



DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 513571

KESEMPATAN WARGA DAN PEMERINTAH MANFAATKAN PTSL

Pemkot Perlu Jembatani Hak Atas Tanah

Oleh Hasan Widagdo
(Sekretaris Fraksi PPP)

PROGRAM Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digulirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) disambut antusias warga. Di Kota Yogya, dari target 5.100 bidang tanah yang harus didata sepanjang tahun ini, realisasinya hingga pertengahan November sudah mencapai 5.196 bidang. Meski sudah melebihi target, namun setiap permohonan tetap diakomodir dan akan diakumulasi dengan kuota tahun depan yang mencapai 4.500 bidang.

Melalui PTSL, setiap bidang tanah akan didaftarkan, terpetakan dan ada keterangan. Dengan begitu ada kepastian objek tanah yang meliputi bentuk, luas dan letak. Seluruh proses pengukuran juga tidak dipungut biaya. Pemohon cukup menyiapkan materai serta batas-batas.

Tingginya capaian program PTSL sepatutnya disambut Pemkot dengan menjembatani warga guna memperoleh hak atas tanahnya. Hal ini lantaran hasil PTSL bisa ditindaklanjuti dengan pengurusan sertifikat bagi tanah berstatus hak milik, maupun pengajuan hak guna atau hak pakai jika statusnya Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG). Apalagi DIY sudah memiliki Perdas 1/2017 yang menyatakan tanah yang belum memiliki alas

Hasan Widagdo.

bidang yang merupakan hak milik dan bisa disertifikatkan. Sedangkan sisanya, merupakan SG atau PAG yang dapat diajukan permohonan hak pakai atau hak guna ke pihak panitikismo.

Oleh karena itu, Dispetaru selayaknya menjembatani warga guna memperoleh kekancingan. Bahkan, Dispetaru perlu membuka gerai layanan informasi dan konsultasi bagi warga terkait alas hak atas tanahnya. Gerai itu pun dapat dikerjasamakan dengan BPN Kota Yogya karena manfaatnya sangat dibutuhkan masyarakat lantaran masih ada ribuan bidang tanah yang ditempati warga dan perlu ada kepastian hak.

Kepastian alas hak tersebut pun bisa dijadikan dasar untuk penataan. Apalagi sebagian besar kawasan kumuh berada di permukiman pinggir sungai yang status tanahnya merupakan SG dan PAG. Seperti halnya di kawasan Ngampilan yang sudah berhasil ditata dengan konsep Mundur Munggah Madhep Kali (M3K). Sehingga butuh koordinasi lintas sektoral dalam rangka pendataan dan penataan kawasan permukiman di pinggir sungai.

Bahkan yang tidak kalah penting ialah akurasi dan validitas bidang tanah maupun permukiman di seluruh bantaran sungai. Data tersebut bisa menjadi acuan penataan sekaligus pemetaan risiko bencana dan skema penanggulangannya. (Dhi)-c

Instansi
Nilai Berita
Sifat
Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005